

**PENGEMBANGAN *LIVING LABORATORY* PENDIDIKAN AKUNTANSI
MELALUI EDUKASI AKUNTANSI PADA UMKM
(*Observasi dan Identifikasi pada UMKM di Kota Solo, Wonogiri, Sukoharjo,
Klaten, Sragen, Boyolali, dan Karanganyar*)**

Sudiyanto, Sigit Santoso, Sohidin, Elvia Ivada*

****Pendidikan Akuntansi, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta***

Email korespondensi: soeddie.fkipuns@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan praktik akuntansi sedemikian pesatnya membawa konsekuensi logis perlunya peningkatan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan praktik akuntansi di industri. Oleh karena itu agar UMKM dapat menyelenggarakan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan yang terstandar merupakan motivasi penelitian ini, yaitu dengan membangun *live laboratory* untuk memberikan edukasi akuntansi UMKM dan melakukan pendampingan implementasi SAK ETAP pada UMKM. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah keberadaan UMKM jika dilihat dari posisi aset dan omset serta bagaimanakah kondisi administrasi dan keuangan serta bagaimanakah upaya UMKM untuk menerapkan standar akuntansi keuangan sebagai sarana untuk menyiapkan informasi akuntansi dan keuangannya untuk disiapkan menjadi *live laboratory* bagi pendidikan akuntansi? Tujuan utama penelitian ini adalah menerapkan pembelajaran berbasis industri (*Living laboratory*) pada beberapa mata kuliah yang objeknya adalah industri UMKM.

Sumber data berasal dari industri UMKM yang digali langsung dengan cara identifikasi, pengolahan, perancangan dan implementasi. Data diambil secara langsung dengan teknik wawancara serta didukung dengan data-data sekunder dari berbagai sumber yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM di Karesidenan Surakarta, yakni Kabupaten Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, dan Kota Surakarta. Data diolah dengan cara melakukan tabulasi dan menyusun gambaran umum mengenai sistem informasi akuntansi keuangan pada UMKM, serta dianalisis dengan menggunakan analisis tabel.

Hasil penelitian mengacu pada tujuan khusus penelitian pada tahun pertama yakni; 1) peneliti berhasil mengidentifikasi dan menetapkan seluruh kegiatan administrasi akuntansi pada UMKM, 2) peneliti telah mengidentifikasi dan menetapkan kesesuaian antara standar akuntansi yang berlaku dengan pencatatan dan pembukuan yang terjadi di UMKM, 3) peneliti menyusun daftar perencanaan kegiatan pembenahan UMKM dari sisi administrasi usaha dan kegiatan operasinya.

Kata kunci: *live laboratory, SAK-ETAP, UMKM, edukasi akuntansi*

PENDAHULUAN

Menghadapi masyarakat Ekonomi Asia (*Asian Economic Community*) pada tahun 2015, semua pelaku ekonomi harus menjadi ‘internasional’. Artinya, produk yang dihasilkan baik itu berupa barang dan jasa harus mampu bersaing dengan produk bangsa Asia lainnya yang leluasa masuk ke Indonesia tanpa adanya filter. Tak terkecuali Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan sumbangan luar biasa bagi perekonomian Indonesia harus bisa tidak saja bertahan di dalam negeri tapi juga bersaing di pasar yang lebih luas yaitu seluruh Asia. Untuk itu, dari segala sisi, UMKM harus berbenah diri agar dapat menjadi internasional. Salah satunya adalah dari sisi pencatatan dan pelaporan keuangannya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar akuntansi ini diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan oleh karena itu juga disebut sebagai SAK UKM. Untuk mengaplikasikan SAK ETAP ini, UMKM harus memiliki pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau sumberdaya yang memahami SAK ETAP. Mengingat keterbatasan yang ada pada UMKM, menyediakan pegawai dengan kualifikasi seperti itu bukanlah perkara mudah. Padahal agar dapat dinilai oleh pihak luar, seperti misalnya perbankan, kreditor lain atau investor maka UMKM harus mampu menampilkan kinerjanya pada suatu laporan keuangan yang terstandar yaitu dengan standar SAK ETAP.

Namun demikian, menurut Setiady persepsi UMKM terhadap pentingnya laporan keuangan menunjukkan bahwa 54% responden menjawab laporan keuangan sangat penting. Hal ini menunjukkan secara umum UMKM mempunyai kebutuhan untuk menghasilkan laporan keuangan. Hal tersebut kemungkinan karena adanya kebutuhan yang semakin besar untuk memiliki suatu laporan keuangan untuk berbagai tujuan seperti persyaratan pengajuan kredit, evaluasi usaha, dan sebagai *input* untuk keputusan melakukan ekspansi usaha. Lebih lanjut, hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan UMKM sangat bervariasi dan memiliki kualitas yang rendah, artinya belum mengikuti standar tertentu dan sesuai dengan persepsi mereka sendiri terhadap suatu laporan keuangan. Rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM tersebut tidak berpengaruh positif terhadap kredit yang diterimanya.

Meskipun sebagian besar UMKM menyadari pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan, beberapa studi (Haryani, 2012) menyatakan bahwa sistem akuntansi tidak dimiliki oleh sebagian besar responden UMKM pada penelitiannya, sehingga mereka tidak menyelenggarakan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Hal ini karena keterbatasan dana, pengetahuan dan kemampuan untuk

melaksanakannya. Lebih lanjut, (Setiady dan Andriani dkk (2014) menyatakan bahwa UMKM yang tidak pernah melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan mengemukakan alasan yaitu sulit dan rumit untuk menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, tidak tersedia cukup waktu, merasa tidak perlu menyusun laporan keuangan karena memang tidak membutuhkannya, dan tidak memiliki sumber daya manusia yang cakap dalam melaksanakan pencatatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

Penyebab yang mereka kemukakan tersebut merupakan masalah klasik yang dihadapi UMKM. Sejalan dengan hal tersebut Basri dan Nugroho (2009) menyebutkan bahwa permasalahan utama dari UMKM berkaitan dengan manajemen keuangan, pengajuan kredit, pelatihan keahlian tenaga kerja, pelatihan kewirausahaan dan lain-lain. Dalam hal ini, banyak dari pengusaha UMKM mulai memperhatikan proses pembukuan dan pelaporan keuangan untuk dapat mengatasi permasalahan manajemen keuangan serta kredit tersebut.

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa SAK ETAP merupakan jawaban atas permasalahan UMKM terutama untuk memperoleh pendanaan dari perbankan, untuk mengetahui kinerja UMKM bagi pemilik yang tidak terlibat langsung. Namun demikian, banyak UMKM merasa keberatan untuk mengimplementasikan SAK ETAP karena keterbatasan dana dan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, membantu UMKM untuk dapat menyelenggarakan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan yang terstandar merupakan motivasi penelitian ini, yaitu dengan membangun *live laboratory* untuk memberikan edukasi akuntansi UKM dan melakukan pendampingan implementasi SAK ETAP pada UMKM. Perumusan masalah dalam penelitian tahun pertama ini adalah” bagaimanakah keberadaan UMKM jika dilihat dari posisi aset dan omset serta bagaimanakah kondisi administrasi dan keuangan serta bagaimanakah upaya UMKM untuk menerapkan standar akuntansi keuangan sebagai sarana untuk menyiapkan informasi akuntansi dan keuangannya?”

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah menerapkan pembelajaran berbasis industry (*Living laboratory*) pada beberapa mata kuliah yang objeknya adalah industri UMKM. Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM di Karesidenan Surakarta, yakni Kabupaten

Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, dan Kota Surakarta. Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh kegiatan administrasi akuntansi pada UMKM.
2. Mengidentifikasi dan menetapkan kesesuaian antara standar akuntansi yang berlaku dengan pencatatan dan pembukuan yang terjadi di UMKM.
3. Menyusun daftar perencanaan kegiatan pembenahan UMKM dari sisi administrasi usaha dan kegiatan operasinya.

Kajian Teori

Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2009 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 45% atau senilai Rp 2.000 triliun, sedangkan tahun 2010 diperkirakan UMKM mampu memberi kontribusi lebih besar lagi kepada PDB Indonesia yakni sekitar Rp3.000 triliun.

Besarnya kontribusi juga terlihat dari tingginya penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM ini, yaitu hingga tahun 2009 sebanyak 91,8 juta atau 97,3% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (Departemen Koperasi 2010). Pada tahun 2010 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 52,2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait kondisi UMKM. Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya (Baas dan Schrooten, 2006).

Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, seperti pembuatan laporan keuangan (Warsono 2009). Namun pelaksanaan pembukuan tersebut merupakan hal yang sulit bagi UMKM karena keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Said, 2009). Berbagai macam keterbatasan lain yang dihadapi UMKM adalah latar belakang

pendidikan yang tidak paham akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan akuntansi, serta tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang: 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Laporan Keuangan UMKM

Kebanyakan dari UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang/utang. Namun pembukuan tersebut tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak perbankan (Jati 2004). Mempekerjakan seseorang secara khusus untuk melakukan pembukuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan masih menjadi hal yang kurang realistis bagi banyak UMKM sebab akan menambah pengeluaran untuk membayar gaji tenaga akuntansi tersebut.

Murniati (2002) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil di Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 283 pengusaha kecil dan menengah. Ditemukan bahwa karakteristik pemilik/manajer (masa memimpin, pendidikan formal manajer/pemilik, dan pelatihan akuntansi yang diikuti manajer/pemilik) serta karakteristik perusahaan kecil dan menengah (umur perusahaan, sektor industri, dan skala usaha) secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan. Penelitian Pinasti (2001) menemukan bahwa para pedagang kecil di pasar tradisional di kabupaten Banyumas tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Secara umum mereka menganggap

informasi akuntansi tidak penting. Baas dan Schrooten (2006) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perbankan dalam penyaluran kreditnya kepada UMKM menggunakan *Soft Information & Hard Information*.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan melakukan *survey* ke seluruh UMKM. Survey ditujukan untuk mengidentifikasi kegiatan usaha dan praktik akuntansi yang berlaku di industri. Selanjutnya, dilakukan pengujian atas kelayakan praktik akuntansi dan keuangan yang berlaku serta sistem pengendalian intern usahanya, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari sistem yang sudah ada. Langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi data berupa praktik administrasi akuntansi dan keuangan yang digunakan untuk melakukan pencatatan setiap kegiatan keuangan di UMKM. Setelah diperoleh data tersebut, maka dapat dilakukan penyusunan rancangan praktik yang sehat menyesuaikan dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.

Sumber Data

Sumber data berasal dari industri UMKM yang digali langsung dengan cara identifikasi, pengolahan, perancangan dan implementasi. Sumber data tersebut merupakan sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber lain yang relevan.

Jenis Data

Pada tahun pertama, jenis data berupa data sekunder yaitu:

- a. Gambaran umum sistem informasi akuntansi keuangan UMKM yang selama ini telah dilaksanakan.
- b. Tingkat pendidikan sumber daya manusia pada bagian keuangan dan bina mitra pada setiap UMKM, untuk mengetahui tingkat kompetensinya dalam menyusun laporan keuangan dan bisnis.
- c. Kegiatan rutin dan non rutin di setiap UMKM yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan usaha.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

- a. Telaah data sekunder (studi literatur).
- b. Wawancara langsung kepada UMKM.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah dengan cara melakukan tabulasi dan menyusun gambaran umum mengenai sistem informasi akuntansi keuangan pada UMKM, serta dianalisis dengan menggunakan analisis tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Identifikasi Data Umum Responden

Tim peneliti merumuskan ada sekitar 12 pertanyaan yang diajukan kepada para UMKM untuk selanjutnya perolehan data tersebut sangat berguna dalam analisis hasil penelitian. Pertanyaan tersebut antara lain; Nama UMKM , Nama pemilik, Tahun berdiri, Alamat, Jenis usaha, (Jasa, Dagang, Manufaktur), Pangsa pasar (Lokal, Nasional, Internasional), Bentuk badan usaha (Perorangan, UD, CV, Firma, PT, Koperasi), Jumlah karyawan, Jumlah omset, Contact person, NPWP, No. PKP. .

Tujuan dari masing-masing pertanyaan dapat peneliti uraikan antara lain; pertanyaan tentang Nama UMKM akan digunakan oleh peneliti guna mengidentifikasi ciri awal UMKM dari nama yang ada, selanjutnya pertanyaan mengenai siapa nama pemilik berguna untuk mengidentifikasi nama-nama pemilik tersebut karena dari sekian banyak responden yang diobservasi khususnya pada kelompok industri mikro dan kecil, hampir seluruhnya menyatakan kepemilikan usaha secara pribadi. Tahun berdiri digunakan peneliti untuk menganalisis keberlangsungan usaha kapan dimulai dan perkembangan hingga dilakukan penelitian ini seperti apa. Kemudian alamat dipakai oleh peneliti untuk mengidentifikasi keberadaan secara tepat dimana lokasi usaha berada. Selanjutnya pertanyaan mengenai jenis usaha akan memberikan gambaran mengenai jenis usaha riil yang dilakukan oleh responden, yang dibedakan menjadi kategori usaha jasa, dagang ataupun manufaktur.

Tabel 1. Jenis usaha responden

	Mikro	Kecil	Menengah
Jasa		3	10
Dagang	23	20	10
Manufaktur	10	10	10
Jumlah	33	33	33

Sumber: data diolah

Adapun pertanyaan mengenai bentuk badan usaha dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang bentuk badan usaha yang dimiliki oleh para pemilik UMKM tersebut. Disamping itu pemilihan bentuk usaha sangat berkaitan dengan kemampuan dari UMKM untuk memperbesar skala usahanya. Artinya dengan posisi badan usaha berupa sebuah PT atau CV jelas memiliki posisi yang lebih kuat untuk berkembang, jika dibandingkan dengan usaha yang hanya berstatus perorangan. Usaha perorangan dianggap memiliki skala dan kekuatan yang kecil dalam peta persaingan usaha. Dari hasil perolehan data responden dapat kami gambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Bentuk Badan Usaha Responden

	Mikro	Kecil	Menengah
Perorangan	33	33	0
UD	0	0	0
Firma	0	0	0
CV	0	0	20
PT	0	0	13
Jumlah	33	33	33

Sumber: data diolah

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa semua industri yang masuk kelompok mikro berupa badan usaha perorangan, demikian juga pada kelompok usaha kecil. Kondisi semacam ini berbeda pada kategori industri menengah, yakni sebanyak 20 responden berbentuk CV dan 13 selebihnya sudah memiliki badan usaha berupa PT.

Pertanyaan selanjutnya mengenai jumlah karyawan yang dimiliki, pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan bahwa dilihat dari jumlah karyawan yang dimiliki maka peneliti benar-benar memiliki keyakinan mengenai kategori usaha yang benar dalam UMKM. Usaha pada level mikro senantiasa diikuti dengan jumlah minim pada karyawannya, rata-rata mereka melakukan pekerjaannya secara individu dan hanya dibantu oleh anggota keluarganya saja. Pada usaha kecil mulai kelihatan banyak industri yang sudah dikerjakan dengan bantuan karyawan lebih dari 10 orang, walaupun pihak

pemilik dan anggota keluarganya masih dominan ikut melaksanakan usahanya secara teknis, dan belum begitu saja mempercayakan pengelolaan kepada karyawannya. Sedangkan pada industri menengah, hampir secara keseluruhan telah memiliki jumlah karyawan lebih dari 20 orang bahkan ada diantaranya yang telah memiliki karyawan lebih dari 100 orang.

Selanjutnya pertanyaan yang berkaitan dengan omset dimaksudkan oleh peneliti untuk memperoleh data guna memberikan analisis mengenai rata-rata perolehan omset jika disesuaikan dengan kategori industrinya antara mikro, kecil dan menengah. Sebagian besar usaha mikro hanya mampu mengumpulkan angka penjualan tidak lebih dari Rp.10 juta per bulannya, dikarenakan kapasitas usahanya yang masih relatif kecil, jumlah modal terbatas dan pangsa pasarnya juga lokal. Sementara itu usaha kecil mampu menghasilkan omset di atas Rp.100 juta perbulannya, bahkan beberapa responden sudah mencatat angka penjualannya hingga jumlah milliaran rupiah. Namun demikian rata-rata juga masih di bawah jumlah Rp4,8 milliar per tahunnya. Sedangkan industri yang masuk kategori menengah rata-rata sudah memperoleh omset hingga di atas Rp4,8 milliar namun masih kurang dari Rp.50 milliar pertahunnya.

Hasil identifikasi Kondisi Usaha Secara Umum

Untuk mengidentifikasi masalah tentang kondisi usaha secara umum, peneliti mengajukan 12 pertanyaan kepada responden. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar pertanyaan tentang kondisi usaha secara umum

No	Pertanyaan
1	Apakah usaha ini dijalankan atas upaya diri sendiri atukah merupakan usaha warisan?
2	Apakah saudara sering berganti-ganti jenis usaha dari usaha yang selama ini dijalankannya?
3	Jika sering berganti-ganti usaha apakah faktor penyebabnya dan berapa kali telah berganti usahanya?
4	Apakah saudara telah memiliki kemantapan dalam usaha yang telah dijalankannya ini?
5	Apakah ada keinginan untuk menjadi lebih besar dari usaha yang telah berjalan?
6	Secara umum kendala apa sajakah yang mempengaruhi kondisi usaha anda?
7	Darimanakah saudara memperoleh sumber permodalan untuk menjalankan usaha ini selama ini?

8	Berapa orangkah yang menjadi pemilik dari usaha ini?
9	Bagaimanakah keinginan anda untuk usaha ini dimasa yang akan datang?
10	Kendala apakah yang saudara hadapi secara umum dari usaha yang telah berjalan ini?
11	Dari kendala yang saudara hadapi tersebut, bagaimanakah saudara mensikapinya sehingga bisa menjadi peluang baik dalam usaha?
12	Apakah ada uluran pihak-pihak terkait yang membantu kelancaran usaha anda selama ini?

Dari sejumlah pertanyaan tersebut peneliti melakukan tabulasi jawaban dan analisis data. Hasil analisis kami uraikan secara deskriptif yang ditunjukkan sebagai berikut.

Kondisi usaha mikro

Usaha yang dijalankan oleh kelompok mikro lebih didominasi oleh faktor kondisi keterpaksaan atau disebabkan karena peralihan masyarakat dari kaum buruh kemudian mencoba berganti menjadi usaha sendiri. Pergantian semacam ini terjadi karena dorongan faktor ekonomi yaitu upaya untuk bertahan dalam hidup. Dengan demikian usaha yang dijalankan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masih jauh dari pemikiran untuk dapat mandiri dalam persaingan.

Kondisi usaha kecil

Bila dibanding dengan pelaku usaha mikro maka bisa dikatakan untuk usaha kecil relatif lebih baik kondisinya. Gambaran lebih baik tersebut dapat dijelaskan antara lain; proses berjalannya usaha lebih stabil dan mapan serta lebih banyak dari mereka mewarisi usaha dari generasi sebelumnya. Sebagian besar dari mereka mengatakan telah mantap menggeluti usahanya karena dianggap sudah sangat cocok dengan impian mereka. Hanya saja karena masih berstatus sebagai usaha kecil, yang sebagian besar juga masih berbentuk usaha perorangan maka hal inilah yang menjadi kendala baginya untuk bisa mengakses sumber dana perbankan yang lebih besar.

Kondisi usaha menengah

Lain usaha mikro dan kecil lain pula usaha menengah, pada sektor usaha menengah telah menunjukkan banyaknya kekuatan baik dari sisi permodalan, manajemen maupun pangsa pasarnya. Oleh karena itu perkembangan untuk berubah menjadi lebih besar jauh lebih cepat baik dari sisi aset, omset maupun pangsa pasarnya. Sektor perbankan juga telah banyak mengulurkan dananya ke usaha menengah dan

perhatian dinas terkait nampaknya juga lebih besar dikarenakan faktor kondisi kemampuan usahanya. Dari gambaran tiga kondisi di atas apabila dibuat matrik pengetahuan mengenai keberadaan UMKM tersebut, maka peneliti bisa menampilkan ringkasan kondisi mereka sebagai berikut.

Tabel 4. Keberadaan UMKM

Ciri utama	Mikro	Kecil	Menengah
Livelihood activities (Nafkah hidup)	33	0	0
Artisan (non entrepreneurship)	0	30	0
Entrepreneurship sedang	0	3	10
Full entrepreneurship	0	0	23
Jumlah	33	33	33

Sumber: data yang diolah

Hasil identifikasi Praktik Administrasi Usaha Secara Umum

Identifikasi terhadap praktik administrasi usaha secara umum dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan penerapan administrasi usaha pada UMKM.

Tabel 5. Daftar pertanyaan tentang praktik administrasi usaha secara umum

No	Daftar Pertanyaan
1	Apakah saudara telah mendaftarkan usaha ini pada instansi terkait?
2	Apakah saudara telah mencatat transaksi usaha ini dengan lengkap?
3	Apakah ada tenaga khusus yang menangani pencatatan usaha anda ini?
4	Apakah saudara merasakan manfaat dari pencatatan usaha yang dilakukannya?
5	Apa sajakah jenis-jenis pencatatan usaha yang telah saudara lakukan untuk usaha ini?
6	Mulai kapanakah saudara telah melakukan pencatatan usaha ini?
7	Bagaimanakah saudara melakukan pencatatan usaha ini, apakah cukup dilakukan secara manual atautkah telah menggunakan alat bantu teknologi?
8	Kendala apa sajakah yang saudara alami dalam melakukan pencatatan usaha ini?
9	Adakah solusi atas kendala yang saudara hadapi tersebut?
10	Adakah pihak-pihak yang memberikan bantuan solusi untuk usaha anda?

Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Kondisi usaha mikro

Pada jenis usaha mikro hampir semua yang menjadi responden menyatakan belum mendaftarkan dirinya untuk memiliki status badan usaha. Hal ini dikarenakan alasan waktu yang dianggapnya belum saatnya mendaftarkan diri dengan kondisi usaha

yang masih amat kecil. Kemudian masalah pencatatan administrasi bisnisnya juga tidak dilakukan dengan benar dan serius.

Bagi industri mikro pencatatan administrasi bisnisnya dinilai belum banyak memberikan manfaat yang berupa informasi untuk pengambilan keputusan bisnis. Mereka lebih banyak menggunakan ingatan saja untuk mencatat segala hal yang terkait dengan usahanya. Oleh karena mereka tidak banyak yang melakukan pencatatan atas administrasi bisnisnya, maka tidak ada kendala yang mereka rasakan dalam pencatatannya.

Kondisi usaha kecil

Pada pelaku usaha kecil kegiatan administrasi sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan pelaku usaha mikro. Sejak dari status badan usaha telah dibukukan dan didaftarkan dengan tertib, kemudian perijinan usaha juga telah dilakukan dengan sehingga tidak menjadi masalah ketika mereka harus berurusan secara administratif dengan pihak lain.

Kondisi usaha menengah

Kondisi yang terjadi pada usaha menengah jauh lebih maju dari segi administrasi bisnisnya dikarenakan tuntutan legalitas usaha yang harus lengkap sebagai industri berkelas menengah. Kendala yang dihadapi relatif lebih mudah disikapi dikarenakan sudah lengkapnya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebagai tuntutan dalam dunia bisnis. Adapun jenis administrasi bisnis yang telah dilakukannya antara lain; administrasi penjualan, administrasi pembelian, administrasi kas dan administrasi gudang.

Hasil tabulasi data mengenai identifikasi praktik pelaksanaan administrasi secara umum bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6. Administrasi Umum UMKM

Kegiatan administrasi	Mikro	Kecil	Menengah
Pendaftaran legalitas usaha	0	30	33
Pendaftaran NPWP dan PKP	0	30	33
Penyelenggaraan buku-buku perusahaan	0	30	33
Pencatatan dalam buku perusahaan	0	30	33

Sumber: data yang diolah

Hasil identifikasi Praktik Kegiatan Pencatatan, Pembukuan dan Akuntansi

Daftar pertanyaan untuk mengidentifikasi kegiatan pencatatan, pembukuan dan akuntansi merupakan daftar pertanyaan inti dalam penelitian ini. Daftar pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran sejauhmanakah para responden dari masing-masing kelompok melakukan kegiatan pencatatan, pembukuan dan akuntansinya, sehingga bisa memperkuat analisis tim peneliti dalam tahapan penelitian pertama ini.

Tabel 7. Daftar pertanyaan tentang praktik pencatatan, pembukuan dan akuntansi pada UMKM

No	Daftar Pertanyaan
1	Apakah saudara mengetahui tentang pembukuan dan akuntansi untuk usaha anda?
2	Bagaimanakah saudara melakukan pencatatan, pembukuan dan akuntansi untuk usaha anda?
3	Apakah saudara telah melakukan pemisahan pencatatan kekayaan pribadi dan kekayaan usaha anda?
4	Apakah anda selalu mencatat dengan tertib setiap transaksi usaha anda setiap waktunya?
5	Apakah anda telah mentaati prinsip-prinsip dalam akuntansi untuk usaha anda?
6	Kapan usaha anda telah dilakukan pencatatan atas transaksinya?
7	Buku-buku apa sajakah yang saudara selenggarakan untuk pencatatan, pembukuan dan akuntansi untuk usaha anda?
8	Apakah anda telah menggunakan alat bantu teknologi informasi untuk memenuhi informasi usaha anda?
9	Apakah anda menggunakan tenaga khusus dalam melakukan pencatatan, pembukuan dan akuntansinya?
10	Adakah kendala yang saudara hadapi dalam melakukan kegiatan pencatatan, pembukuan dan akuntansi usaha anda?
11	Solusi apa sajakah yang anda berikan untuk permasalahan pencatatan, pembukuan dan akuntansi tersebut?

Dari daftar pertanyaan tersebut, peneliti menemukan sejumlah fakta dalam penelitian sebagai berikut.

Kondisi usaha mikro

Pada kelompok pelaku usaha mikro tidak ditemukan kondisi dimana pelaku usaha telah memahami tentang pembukuan dan akuntansi, yang dipahami sebatas pencatatan karena mereka sekedar melakukan pencatatan saja atas usaha yang dilakukannya. Itupun tidak semua transaksi dicatat dalam bukunya, sebagian transaksi yang lain cukup diingat saja. Dengan demikian upaya pemisahan antara aset pribadi

dengan aset perusahaan jelas tidak mungkin dilakukannya, mengingat mereka tidak memiliki konsep mengenai pemisahan kekayaan tersebut.

Kondisi usaha kecil

Lain halnya pada kelompok usaha kecil sebagian dari mereka telah melakukan pembukuan bahkan kegiatan akuntansinya telah dipatuhi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Wujud kegiatan pembukuan tersebut berupa pencatatan dalam buku tabelaris yang merupakan bentuk paling sederhana berbasis kas. Namun demikian dengan bentuk tersebut mereka bisa menghasilkan laporan keuangan yang memadahi dan patuh terhadap standar akuntansi. Adapun yang telah melakukan kegiatan akuntansi mereka telah sepenuhnya melakukan kegiatan tersebut menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Kondisi usaha menengah

Sementara itu jika kita melihat aktivitas para usaha menengah maka bisa dibuktikan bahwa hampir semua dari mereka telah melakukan kegiatan akuntansi secara lengkap dan benar, bahkan hampir sebagian besar telah dilakukan pemeriksaan laporan keuangannya oleh kantor akuntan publik terdaftar. Sebagian besar telah menunjukkan bahwa proses pembukuan disamping telah mentaati standar akuntansi yang berlaku, mereka juga menggunakan bantuan teknologi baik berupa komputer maupun software untuk bisa menghasilkan informasi keuangan yang memadahi. Tabel berikut menyajikan ringkasan dari tabulasi perolehan jawaban yang diperoleh dari jumlah responden yang ada mengenai pelaksanaan kegiatan pencatatan, pembukuan dan akuntansi.

Tabel 8. Pencatatan, Pembukuan dan Akuntansi pada UMKM

Kegiatan pokok	Mikro	Kecil	Menengah
Pencatatan	0	10	0
Pembukuan	0	20	3
Akuntansi	0	3	30
Jumlah	0	33	33

Sumber: data yang diolah

Hasil identifikasi Praktik Pelaporan Usaha

Identifikasi terhadap pelaporan usaha dimaksudkan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang jenis-jenis pelaporan apa sajakah yang dihasilkan oleh pihak UMKM

terutama dalam menghadapi tuntutan pemenuhan kebutuhan informasi bisnis dan keuangan.

Tabel 9. Daftar pertanyaan tentang praktik pelaporan usaha

No	Daftar Pertanyaan
1	Apakah dari pencatatan, pembukuan atau akuntansi yang saudara lakukan telah menghasilkan laporan?
2	Laporan apa sajakah yang bisa dihasilkan?
3	Siapa sajakah pengguna laporan yang saudara hasilkan?
4	Apakah ada laporan lain yang dikehendaki oleh para pengguna/pemakai laporan?
5	Apakah saudara telah merasa cukup dengan informasi dari laporan yang dihasilkan?
6	Bagaimanakah saudara menghasilkan laporan, apakah secara manual atautkah berbantuan teknologi software?
7	Kendala apakah yang terjadi dari proses pelaporan yang dilakukan selama ini?
8	Adakah solusi yang anda lakukan untuk menjamin tidak ada lagi kendala dalam proses pelaporan usahanya?
9	Apakah ada pihak lain yang ditunjuk secara profesional untuk menghasilkan laporan tersebut?
10	Bagaimanakah keterlibatan pemerintah atau dinas terkait dengan proses pelaporan yang dibuat tersebut?
11	Apakah saudara menggunakan tenaga ahli untuk membantu menghasilkan pelaporan dengan baik dan benar?

Dari tabel pertanyaan di atas peneliti memperoleh data-data yang selanjutnya setelah dianalisis dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Kondisi usaha mikro

Usaha mikro dengan segenap keterbatasannya tentu saja menghadapi banyak kendala, termasuk dalam menghadapi persaingan usahanya. Dikarenakan dari awal usaha ini tidak mengenal adanya pembukuan maupun akuntansi maka sudah pasti tidak adanya laporan yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Tidak adanya laporan yang dihasilkan berdampak serius terhadap perkembangan usahanya.

Kondisi usaha kecil

Sementara itu pada kelompok usaha kecil, sebagian besar industri yang telah melakukan kegiatan pencatatan, pembukuan maupun akuntansi telah menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan. Dengan telah dihasilkannya laporan tersebut, pihak perbankan maupun investor tidak sedikit yang mulai melirik potensi usahanya untuk didanai setiap waktunya. Kendala yang dihadapi dalam

pelaporan usahanya adalah masih minimnya penggunaan teknologi yang bisa mempercepat laporan keuangan dan laporan lainnya dihasilkan.

Kondisi usaha menengah

Pada kelompok usaha menengah yang sebagian besar telah melakukan kegiatan pembukuan maupun akuntansi, mereka sudah bisa menghasilkan berbagai jenis laporan seperti laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Sebagian besar nampak telah menggunakan alat bantu software untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang memadai.

Tabel 10. Pelaporan pada UMKM

Jenis laporan	Mikro	Kecil	Menengah
Laporan neraca	0	30	33
Laporan laba rugi	0	30	33
Laporan perubahan ekuitas	0	30	33
Laporan laba di tahan	0	30	33
Laporan arus kas	0	30	33
Laporan lain (lap bisnis)	0	3	33

Sumber: data yang diolah

1. Hasil identifikasi Praktik Perpajakan

Identifikasi terhadap praktik perpajakan ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan di UMKM. Kewajiban perpajakan tersebut bisa dilihat dari jenis aktivitasnya yang terdiri dari menghitung, membayar dan melaporkan.

Tabel 11. Daftar pertanyaan tentang praktik kewajiban perpajakannya

No	Daftar Pertanyaan
1	Apakah anda sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP?
2	Apakah saudara sudah mendaftarkan diri sebagai PKP dengan memiliki NPPKP?
3	Apakah anda telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lengkap dan benar, yaitu menghitung, membayar dan melaporkan?
4	Apakah anda telah menggunakan tenaga perpajakannya sesuai kebutuhan kompetensinya di usaha anda?
5	Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya?
6	Adakah solusi yang sudah anda temukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
7	Bagaimanakah peran kantor pelayanan pajak dalam membantu anda melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya?

- | | |
|---|--|
| 8 | Apakah anda sudah menggunakan bantuan teknologi dalam pelaporan pajaknya? |
| 9 | Kendala apa sajakah yang anda hadapi dalam pemanfaatan teknologi tersebut? |

Dari hasil diskusi dan pertanyaan yang dilontarkan kepada pelaku UMKM, berikut kami deskripsikan uraian jawaban yang berkaitan dengan aspek kewajiban perpajakan.

Kondisi usaha mikro

Sejak awal informasi usaha mikro dinyatakan banyak diantara para pelaku bisnis mikro tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Alasannya karena keberadaannya yang masih amat mikro dan jika dilihat dari jenis transaksinya usaha tersebut belum layak jika dikenakan unsur pajak, maka peneliti tidak menemukan adanya kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi oleh usaha mikro. Mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban dalam bidang perpajakan sebagai salah satu pelaku usaha.

Kondisi usaha kecil

Pada sektor usaha kecil sudah nampak mereka mulai melakukan kewajiban perpajakannya walaupun baru dalam unsur PPh OP dan PPh Badan secara tahunan. Sedangkan kewajiban pajak secara bulanan atau masa seperti halnya PPh 21 dan PPN. Seharusnya jika dilihat dari status usaha yang dimiliki serta jumlah omset dan jenis transaksinya, mereka sudah harus melakukan pemenuhan kewajiban pada beberapa jenis pajak, namun demikian pemahaman UMKM berskala kecil inipun juga nampaknya masih kurang dalam hal perpajakan. Kendala yang dihadapi dalam pelaporan pajak diantaranya adalah minimnya pemahaman pemilik terhadap kewajiban perpajakan, tidak adanya tenaga yang memadai untuk mengurus perpajakannya dan kurangnya informasi dari dinas terkait dengan kewajiban perpajakannya.

Kondisi usaha menengah

Kewajiban perpajakan pada industri berskala menengah sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik dan benar, jika dilihat dari jenis pajak dan pelaporannya. Namun demikian masih dijumpai ada beberapa industri kelompok ini yang masih saja belum benar dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, mereka sudah menghitung sendiri, membayar namun kadang tidak melaporkan, sehingga kewajiban pajaknya

belum selesai. Jenis kendala yang dihadapinya pun nampaknya sama dnegan kondisi pada kelompok usaha kecil, yakni masih kurangnya pemahaman pemilik, dan minimnya tenaga ahli di bidang perpajakan. Padahal seharusnya pada kategori industri menengah sudah harus dipikirkan bahkan diterapkan tax planning dalam rangka penghematan biaya pajak.

Tabel 12. Pelaporan pajak UMKM

Jenis kewajiban	Mikro	Kecil	Menengah
Menghitung	0	20	33
Membayar	0	20	33
Melaporkan	0	10	33

Sumber: data yang diolah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Beberapa kesimpulan dari penelitian dasar atas 99 responden yang terdiri dari 33 UMKM berskala mikro, 33 UMKM berskala kecil dan 33 UMKM berskala menengah, maka dapat kami sajikan sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari keberadaannya, maka ciri yang melekat pada UMKM adalah; manajemen berdiri sendiri dengan kata lain tak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Modal banyak disediakan dari para pemilik semata dan tidak banyak bersumber dari pihak eksternal.
2. Daerah operasinya atau wilayah pangsa pasarnya 99% adalah lokal pada industri mikro dan kecil. Namun 50% dari usaha menengah pasarnya sudah mencakup nasional bahkan ekspor.
3. Berdasarkan kategori keberlangsungan usahanya, maka 100% usaha mikro berjalan untuk bertahan dalam hidup, 50% pada skala industri kecil terlihat mental artisan, yakni perajin dan tidak bermental entrepreneurship. Sedangkan pada industri menengah sebagian besar atau lebih dari 50% sudah merupakan perusahaan dengan kategori full entrepreneurship.
4. Dalam kegiatan administrasi akuntansinya, usaha mikro tidak ada yang melakukan kegiatan pembukuan dan akuntansi, sebagian besar yakni 99% dari mereka hanya sekedar melakukan pencatatan saja. Selanjutnya pada usaha kecil 80% telah melakukan pembukuan dan hanya sekitar 20% yang melajukan kegiatan akuntansi.

Sedangkan pada usaha menengah 99% sudah melakukan kegiatan akuntansi, dengan hasil laporan keuangan yang memadai sesuai dengan standar akuntansi.

5. Dalam kewajiban perpajakan, industri mikro tidak ada yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan mereka tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Pada usaha kecil lebih dari 50% telah melakukan kewajiban menghitung dan membayar, namun hanya sekitar 20% saja yang melaporkan. Sedangkan pada industri menengah 99% telah melakukan kewajiban dibidang perpajakan dengan baik dan benar, yakni menghitung, membayar dan melaporkan.
6. Hasil identifikasi secara keseluruhan dari sektor UMKM kelompok mikro, kecil dan menengah memang menggambarkan fenomena yang berbeda dalam segala hal, hal ini dikarenakan kondisi UMKM yang berbeda tersebut dilatarbelakangi oleh kemampuan ekonomi yang berbeda untuk melakukan sejumlah langkah kemajuan.

Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran kepada beberapa pihak terkait sejalan dengan banyak fenomena yang ditemukan dari hasil penelitian.

1. Dinas terkait

Dinas terkait yang kami maksudkan adalah Dinas Koperasi dan UMKM yang selama ini banyak menaungi keberadaan UMKM bahkan tidak sedikit dana juga telah dikucurkan kepada UMKM dalam berbagai bentuk seperti pelatihan, pendampingan sampai dengan monitoring. Masih rendahnya kesadaran para UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakan seharusnya menjadi catatan penting tersendiri bagi pihak KPP untuk melakukan banyak pendekatan dalam segala bentuk guna meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya membayar pajak.

2. Pihak UNS

Dari pihak UNS selaku lembaga pendidikan tinggi seharusnya juga lebih mengintensifkan beberapa kegiatan Tri Dharma perguruan tingginya dalam rangka ikut membantu dan mendorong pertumbuhan UMKM agar cepat bisa naik kelas.

DAFTAR PUSTAKA

Anna, Yane Devi. 2011. *Analisis Penerapan Akuntansi dan Laporan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah- Sentra Industri Kaos di Jawa Barat*. Seminar

Nasional “Perkuatan UMKM sebagai *Leading Sector* Perekonomian Indonesia”. Institut Manajemen Telkom (IMT). Bandung.

- Auliyah, Iim Ma’rifatul. 2012. Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 2 No: 1 Tahun 2014) pada UKM kampung batik di sidoarjo. Artikel ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Bank Indonesia. 2010. *Kajian Mengenai Rumusan Standar Minimum Laporan Keuangan dan Business Plan untuk UMKM- Persiapan Bank Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ediraras, Dharma T. Akuntansi dan Kinerja UKM. Jurnal Ek onomi Bisnis No. 2, Volume 15, Agustus 2010. Universitas Gunadarma.
- Herawati, Trisna, dkk. 2010. *Pelatihan Penyusunan Laporan Laba Rugi (Income Statement) pada Perusahaan Jasa Salon dan Spa di Kota Singaraja*. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Diunduh pada <http://www.iaiglobal.or.id/> tanggal 3 Desember 2013.
- Jogiyanto, 2007. *Sistem Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Musmini, Lucy Sri. 2012. *Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Rumah Makan Taliwang Singaraja)*. VOKASI Jurnal Riset Akuntansi Vol. 2 No.1, April 2013, ISSN 2337 – 537X. Jurusan Akuntansi Program Diploma III, FEB Undiksha.
- Neuman, W. L. (2000). *Sosial research methods: qualitative and quantitative approaches*. Allyn and Bacon. Boston.
- Pinasti, M. 2007. *Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pengusaha Kecil Atas Informasi Akuntansi Suatu Riset Eksperiman*.
- Riyanto, Rum. 2011. Keberadaan Pajak UMKM bagi Pembangunan Indonesia.
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).